

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Hairul Amren¹, Avegloria Sevtevani Manik², Rafid Khasyi Sima³, Muhammad Ihsan⁴, Vahri Lumbantobing⁵

hairulamren123@gmail.com¹, avegloriamanik@gmail.com², rafid.khasyi@gmail.com³,
mihsan087387@gmail.com⁴, vahri1836@gmail.com⁵

Politeknik Penerbangan Medan

ABSTRAK

Pancasila, sebagai landasan negara dan ideologi bangsa Indonesia, berfungsi tidak hanya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai sistem filsafat yang mendasari pandangan hidup, cita-cita, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila terdiri dari lima sila yang saling terhubung, membentuk kerangka berpikir yang utuh. Sila kelima ini mencerminkan nilai-nilai universal yang luhur dan mengandung prinsip-prinsip moral yang relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pancasila sebagai sistem filsafat, menggali makna mendalam dari setiap sila, serta memahami relevansi dan penerapannya dalam konteks kehidupan modern. Melalui pendekatan filosofis, diharapkan penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang Pancasila sebagai landasan moral dan etis, serta sebagai pedoman dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan jujur.

Kata Kunci: Pancasila, Sistem Filsafat.

Abstract

Pancasila, as the foundation of the state and ideology of the Indonesian nation, functions not only as a guideline in national and state life, but also as a philosophical system that underlies the outlook on life, ideals, and values of Indonesian society. As a philosophical system, Pancasila consists of five interconnected principles, forming a complete framework of thought. This fifth principle reflects noble universal values and contains moral principles that are relevant in various aspects of life. This study aims to analyze Pancasila as a philosophical system, explore the deep meaning of each principle, and understand its relevance and application in the context of modern life. Through a philosophical approach, it is hoped that this study can strengthen the understanding of Pancasila as a moral and ethical foundation, as well as a guideline in realizing a just, prosperous, and honest society.

Keywords: Pancasila, Philosophical System.

PENDAHULUAN

Pancasila adalah landasan filosofis bagi Negara Republik Indonesia yang secara resmi disetujui oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dimuat dalam pembukaan UUD 1945.

Pancasila terdiri dari lima sila yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan dijadikan sebagai dasar Negara Indonesia. Dalam perkembangannya, Pancasila sebagai filosofi negara telah mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik, sering digunakan oleh penguasa untuk memperkuat kekuasaan. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila sering berubah dan disalahartikan, terutama di kalangan masyarakat awam.

Nilai-nilai Pancasila telah menjadi landasan utama bangsa Indonesia yang harus dijaga sebagai pedoman negara dalam menghadapi kemajuan zaman. Hal ini sangat penting, terutama bagi masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi. Peran pendidikan tinggi pendukung menjadi utama dalam menjaga ideologi negara sebagai identitas dan ciri khas bangsa. Dengan demikian, perkembangan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi fondasi bangsa yang perlu dilestarikan untuk mendukung masa depan.

Secara umum, setiap negara di dunia memiliki berbagai macam landasan yang

menopang agar negara tersebut tetap kuat, stabil, dan tidak terpengaruh oleh masalah yang muncul di masa kini. Pada dasarnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia melalui kemampuannya untuk menjaga kehidupan duniawinya. Oleh karena itu, terdapat hubungan dialektis antara ideologi dan masyarakat negara. Di satu sisi, ideologi membuat pandangan masyarakat menjadi lebih realistis, sementara di sisi lain, ideologi mendorong masyarakat untuk mendekati bentuk yang ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa, dan negara, sekaligus membentuk masyarakat menuju cita-citanya. Indonesia juga demikian, dengan landasan negaranya yang disebut Pancasila

Pancasila, sebagai ideologi negara, memiliki ciri-ciri yang mendasar dalam sejarah Indonesia. Pancasila dianggap sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberikan kekuatan hidup dan pedoman dalam mencapai kehidupan yang lebih baik untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana setiap sila tidak dapat ditukar tempat atau diubah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah pandangan hidup serta dasar negara.

Sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila mencerminkan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah terbukti kebenaran, kekuatan, dan kemampuannya. Tidak ada kekuatan apa pun yang dapat memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Mempelajari Pancasila secara mendalam membuat kita lebih sadar akan jati diri sebagai bangsa Indonesia, dan nilai-nilai ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih berwawasan dan berintegritas tinggi.

Melalui makalah ini diharapkan dapat membantu kita berpikir lebih kritis tentang makna Pancasila.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi literatur yang meninjau dan membahas berbagai artikel penelitian sebelumnya, serta mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah hasil diskusi yang relevan dengan topik penelitian mengenai Implementasi Pancasila sebagai Sistem Filsafat di Era Reformasi. Studi literatur ini juga mencakup metode pengumpulan informasi melalui bacaan dari buku, artikel, surat kabar, serta laporan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Artikel ini akan lebih fokus pada pembahasan hasil-hasil penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN FILSAFAT PANCASILA

Hakikat Filsafat Pancasila

Filsafat berasal dari istilah "Philosophy," yang secara epistemologis terbagi menjadi dua kata: "philos" atau "philein," yang berarti cinta, dan "sophia," yang berarti hikmat atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat dimaknai sebagai cinta terhadap hikmat atau kebijaksanaan (Sutrisno)

Pancasila juga dapat dianggap sebagai suatu filsafat, karena ia berfungsi sebagai acuan intelektual yang memandu cara berpikir bangsa Indonesia. Dalam konteks keilmuan, Pancasila dapat berkembang menjadi sebuah sistem filsafat yang kredibel. Abdulgani (dalam Ruyadi, 2003) menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang muncul sebagai ideologi kolektif, yang mewakili cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Pancasila merupakan hasil refleksi mendalam yang kemudian dirumuskan dalam suatu sistem yang tepat. Notonagoro (dalam Ruyadi, 2003) menambahkan bahwa filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmiah mengenai hakikat dari pancasila.

Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat yang memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang unik, yang membedakannya dari sistem filsafat lainnya. Dari sudut pandang ontologis, kajian Pancasila bertujuan untuk memahami hakikat dasar dari masing-masing sila. Notonagoro (dalam Ganeswara, 2007) mengemukakan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum utama dari Pancasila. Lebih jauh lagi, hakikat manusia mencakup segala kompleksitas makhluk hidup, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan lebih rinci dengan kebencian terhadap nilai-nilai Pancasila, seperti pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dan kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam musyawarah/perwakilan, serta keadilan sosial, semuanya.

Kajian epistemologis filsafat Pancasila bertujuan untuk memahami hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Titus (dalam Kaelan, 2007), terdapat tiga pertanyaan utama dalam epistemologi, yaitu: (1) mengenai sumber pengetahuan manusia; (2) teori kebenaran pengetahuan manusia; dan (3) karakteristik pengetahuan manusia. Mengenai sumber pengetahuan Pancasila, diketahui bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dirumuskan secara kolektif oleh para "Founding Fathers". Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat dianggap sebagai

Selanjutnya Pancasila sebagai sistem pengetahuan memiliki struktur yang bersifat formal-logis, baik dalam susunan sila-silanya maupun makna dari setiap sila. Susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Selain itu, sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya membentuk suatu kesatuan Menurut Titus (dalam Kaelan, 2007), terdapat tiga pertanyaan utama dalam epistemologi, yaitu: (1) mengenai sumber pengetahuan manusia; (2) teori kebenaran pengetahuan manusia; dan (3) karakteristik pengetahuan manusia. Mengenai sumber pengetahuan Pancasila, diketahui bahwa Pancasila berasal dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan dirumuskan secara kolektif oleh para "Founding Fathers". Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat dianggap sebagai Kausa Materialis-nya Pancasila.

Meskipun demikian, sistem filsafat itu sendiri adalah suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus. Perenungan awal yang dilakukan oleh para pendiri negara menjadi bahan dasar yang dapat terus menginspirasi pemikiran para pemikir selanjutnya. Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, dan Sastrapratedja adalah beberapa pemikir yang memberikan perhatian pada Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas posisi Pancasila sebagai sistem filsafat melalui berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat.

Penting bagi mahasiswa untuk memahami Pancasila secara filosofis, karena mata kuliah Pancasila di tingkat perguruan tinggi mengharuskan mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat (Taufiqurrahman, 2018). Pancasila sebagai filsafat mencakup pandangan, nilai, dan pemikiran yang berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan realitas budaya bangsa, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dianggap sebagai filsafat karena merupakan hasil refleksi mendalam yang dilakukan oleh para founding fathers, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmiah mengenai hakikat dari Pancasila.

URGENSI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara, kita dapat menggunakan dua pendekatan: pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia.

Pendekatan institusional berkaitan dengan pembentukan dan penyelenggaraan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan negara dan memenuhi kepentingan nasional. Di sisi lain, pendekatan sumber daya manusia mencakup dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tetapi melihat kejadian yang jauh dari sikap penerapan nilai-nilai Pancasila pada Indonesia seperti, masyarakat yang hanya menganut agama tertentu karena faktor mayoritas sehingga ia tidak bisa menjalani ajaran agamanya dengan baik, sikap tidak adil terhadap sesama hanya karena perbedaan suatu hal, aksi bentrok antar suku karena rendahnya kesadaran dan rasa kesatuan, dan perlakuan tidak adil di beberapa tempat sosial karena faktor perbedaan RAS.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Pemahaman ini mencakup tahap implementasi yang selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga dapat terhindar dari praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Selain itu, warga negara yang terlibat dalam bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai etika bisnis untuk menghindari liberalisme yang tidak terkendali, serta mencegah terjadinya monopoli dan monopsoni.

Warga negara yang berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan dan bidang politik juga perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Indonesia akan dapat mencapai tujuan yang diimpikan oleh para pejuang di masa lalu, asalkan rakyat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS, POLITIS TENTANG PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

1. Sumber Historis sebagai Sistem Filsafat

A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sejak zaman prasejarah hingga menjelang kemerdekaan Indonesia, masyarakat Nusantara telah mengalami ribuan tahun pengaruh dari berbagai agama lokal, termasuk sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, serta 4 abad pengaruh Kristen. Dalam konteks ini, Tuhan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di Nusantara.

B. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia muncul dari gabungan pengalaman sejarah bangsa. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim yang telah menjelajahi berbagai penjuru nusantara dan bahkan dunia. Pengembaraan ini telah membentuk karakter bangsa Indonesia, yang oleh Soekarno disebut sebagai Internasionalisme atau Perikemanusiaan.

C. Sila Persatuan Indonesia

Kebangsaan Indonesia mencerminkan kesatuan dalam keragaman, menggabungkan unsur-unsur baru dan yang sudah ada. Indonesia adalah bangsa majemuk yang luar biasa, di mana keberagaman sosial, budaya, dan teritorial dapat bersatu dalam satu komunitas politik yang dikenal sebagai kebangsaan Indonesia.

D. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Demokrasi, yang merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul seiring dengan terbentuknya negara republik Indonesia yang merdeka. Sejarah mencatat bahwa kerajaan-kerajaan sebelum Indonesia merdeka adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja yang bermaksud autokrat.

E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Masyarakat yang adil dan makmur adalah impian akan kebahagiaan yang telah menggelora dalam hati bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Cita-cita kebahagiaan tersebut diungkapkan dalam ungkapan, “Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.”

2. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat

Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal di Indonesia dalam bentuk pandangan hidup atau cara hidup yang terintegrasi dalam agama, adat, dan budaya berbagai suku bangsa. Kelompok kedua meliputi masyarakat ilmiah-akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan pendekatan yang bersifat akademis

Kelompok pertama melihat sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam konteks pandangan hidup atau kearifan lokal, yang menunjukkan bahwa unsur-unsur filosofis Pancasila berfungsi sebagai pedoman praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, karena perkembangan kepercayaan di masyarakat yang meliputi animisme, dinamisme, politeisme, hingga mono.

Menurut Notonagoro, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa sila-sila Pancasila saling terkait dan berhubungan secara koheren. Notonagoro menggambarkan kesatuan dan hubungan antar sila Pancasila dalam bentuk hubungan hierarkis piramidal serta kesatuan yang saling mengisi atau mengkualifikasi satu sama lain.

3. Sumber Politik Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pada mulanya, Pancasila merupakan sebuah konteks politik yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem filsafat. Sumber politik Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok umum pertama meliputi wacana politik mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat yang dibahas dalam sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah Soekarno pada tahun 1958 dan 1959, di mana sila-sila Pancasila dibahas secara filosofis. Kelompok kedua meliputi berbagai argumentasi politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang diangkat kembali pada era reformasi dalam pidato politik Habibie pada 1 Juni 2011.

Wacana politis mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat mulai muncul ketika Soekarno memperkenalkan konsep *Philosophische Grondslag*, yang berarti dasar filsafat negara. Ini menunjukkan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar spiritual untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia. Dalam kuliah umum di Istana Negara pada tanggal 22 Mei 1958, Soekarno menegaskan bahwa Pancasila sebagai *Weltanschauung* dapat menyatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara dari disintegrasi.

Sumber politik Pancasila sebagai sistem filsafat juga terkait dengan kesepakatan mengenai penggunaan simbol-simbol dalam kehidupan bernegara. Garuda Pancasila merupakan salah satu simbol penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Bendera Negara Indonesia adalah Sang Merah Putih.” Pasal 36 menyatakan, “Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia.” Pasal 36A mengatur, “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.” Pasal 36B menyebutkan, “Lagu Kebangsaan Indonesia adalah *Indonesia Raya*.” Bendera Merah Putih, Bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu *Indonesia Raya* adalah simbol-simbol penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

MEMBANGUN ARGUMEN TENTANG DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

1. Dinamika Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Pancasila merupakan filsafat yang berasal dari Indonesia, tumbuh dari akulturasi budaya bangsa. Di bawah pemerintahan Soeharto, posisi Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami perkembangan menuju dimensi yang lebih praktis, yang lebih tepat disebut sebagai *weltanschauung*. Dengan kata lain, filsafat Pancasila tidak hanya fokus pada pencarian kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal ini, Soeharto memperkenalkan sistem filsafat Pancasila melalui program penataran P-4.

Namun, pada masa reformasi, gaung Pancasila sebagai sistem filsafat mulai redup. Meskipun demikian, Pancasila tetap menjadi topik yang dibahas dalam wacana akademik, termasuk kritik dan refleksi yang disampaikan oleh Habibie dalam pidatonya pada 1 Juni 2011. Habibie mengungkapkan bahwa Pancasila seolah-olah terkandung dalam sejarah masa lalu yang dianggap tidak lagi relevan untuk dimasukkan dalam proses dialektika reformasi. Ia mencatat bahwa Pancasila semakin jarang disebut, dikutip, dan diperbincangkan dalam konteks ketatanegaraan, kebangsaan, dan masyarakat. Pancasila seolah terjebak dalam kesunyian di tengah hiruk-pikuk kehidupan bangsa Indonesia yang semakin aktif dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

2. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam beberapa aspek berikut:

Pertama, kapitalisme, yaitu paham yang percaya bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usaha demi meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila dari kapitalisme adalah penekanan berlebihan pada kebebasan individu, yang dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti monopoli dan gaya hidup konsumerisme.

Kedua, komunisme adalah ideologi yang muncul sebagai respon terhadap perkembangan kapitalisme dalam masyarakat liberal. Komunisme berkeyakinan bahwa modal kepemilikan harus dikuasai oleh negara untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata bagi seluruh rakyat. Salah satu tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kecenderungan dominasi negara yang berlebihan, yang bisa menghilangkan peran serta partisipasi rakyat dalam kehidupan bernegara.

PERAN PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DI ERA REFORMASI

Penerapan nilai-nilai Pancasila yang hanya bersifat semu pada masa Orde Baru menjadikan masyarakat Indonesia sebagai objek dari ideologi tersebut. Gambaran reformasi lebih jelas muncul ketika Indonesia memasuki era. Banyak warga negara mulai meragukan Pancasila dan berusaha mencari “ideologi alternatif” yang diyakini dapat membawa mereka kembali ke kesejahteraan. Bagi generasi tua yang sebagian besar hidup di era Orde Baru, ideologi Pancasila yang diterapkan saat itu dianggap ideal, stabil, dan mampu menciptakan kesejahteraan. Namun, bagi generasi muda yang mengalami pahitnya masa transisi dengan maraknya korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), krisis ekonomi, dan krisis multidimensi, Pancasila dipersepsikan sebagai ideologi yang rapuh dan membawa Indonesia

Pada era reformasi, semangat egosentris kelompok tertentu, baik yang berlandaskan etnis, kedaerahan, maupun agama, mulai bangkit. Kepentingan masyarakat sebagai satu bangsa yang terpecah, yang akhirnya mengarah pada munculnya kelompok-kelompok radikal di Indonesia, khususnya yang berbasis agama. Kelompok radikal ini seringkali bertindak di luar prosedur dan inkonstitusional, seperti melakukan aksi kekerasan atas nama

agama dan membawa simbol-simbol keagamaan. Contohnya termasuk serangkaian peristiwa pengrusakan tempat ibadah Ahmadiyah, perusakan tempat hiburan oleh Front Pembela Islam (FPI), hingga aksi terorisme yang melibatkan organisasi Islam ekstremis, seperti Jama'ah Islamiyah (JI).

Generasi muda yang hidup di era reformasi dianggap mengalami situasi anomie, yang mengakibatkan nilai-nilai Pancasila tidak tertanam kuat dalam diri mereka. Kebebasan informasi, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan pasar bebas, telah melahirkan budaya kebarat-baratan (westernisasi) dengan pola kehidupan konsumtif. Hal ini menyebabkan generasi muda saat ini sangat menggemari produk-produk asing, sementara produk dalam negeri mulai diabaikan. Generasi muda dibanjiri informasi yang sangat banyak, yang sering kali bersifat negatif, membuka peluang bagi masuknya informasi tanpa filter yang dapat mengubah karakter dan perilaku mereka. Akibatnya, generasi muda menjadi bingung tentang identitas diri mereka, asal usul mereka, dan pada akhirnya melupakan sejarah bangsa serta terasing dari nilai-nilai luhur Pancasila

Tabel 1

Data Persentase Konflik Kekerasan Yang Terjadi Dalam Setahun

No.	Konflik	Persentase
1.	Penghakiman massa	30%
2.	Tawuran	21 %
3.	Konflik Politik	16 %
4.	Konflik Sumberdaya Ekonomi	11 %
5.	Konflik Sumberdaya Alam	10 %
6.	Insiden konflik etnis atau Agama antar Aparat dan lain-lain	22 %

Teori konflik menganalisis pertikaian dan konflik dalam suatu sistem sosial. Masyarakat tidak akan selalu berada dalam keadaan teratur, dan dominasi, paksaan, serta kekuasaan akan selalu ada. Berbagai otoritas menciptakan hubungan superordinasi dan subordinasi. Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat memicu konflik karena perbedaan kepentingan (Annisa & Ulfatun Najicha, 2021).

Berdasarkan hal ini, penting untuk memikirkan bagaimana menempatkan kembali Pancasila di mata masyarakat agar citra Orde Baru tidak muncul kembali. Penempatan ini perlu dilakukan karena kondisi sosial budaya yang mendukung tidak dapat berkembang tanpa adanya kesediaan masyarakat untuk menerima Pancasila. Penerimaan tersebut tergantung pada pandangan masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam konteks sosial.

Penting untuk menempatkan Pancasila dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Masyarakat harus terintegrasi di atas dasar konteks bangsa. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi nilai sosial yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia. Pancasila yang diperkenalkan kepada masyarakat adalah Pancasila sebagai etika sosial bersama, dilihat dari perspektif sosial politik, bukan dari sisi filosofis. Pemaknaan Pancasila sebagai konsep filsafat dianggap kurang relevan dalam upaya integrasi masyarakat Indonesia. Sebagai norma sosial fundamental, Pancasila memiliki dua fungsi dalam masyarakat Indonesia: pertama, sebagai nilai konteks yang dapat mempersatukan dan sebagai cita-cita bersama; kedua, sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik.

FILSAFAT PANCASILA DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui proses pembelajaran. Dalam praktik

pendidikan yang bersifat universal, terdapat berbagai komunitas yang memberikan beragam makna mengenai pendidikan. Di Indonesia, fokus pendidikan terletak pada penguasaan dasar-dasar untuk membentuk masyarakat yang meritorik, yaitu memberikan alokasi jam pelajaran yang cukup untuk menguasai mata pelajaran tertentu. Secara terminologis, pendidikan adalah terjemahan dari istilah “Pedagogi,” yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Paidos” yang berarti budak dan “Agoo” yang berarti membimbing. Dengan demikian, pedagogi dapat diartikan sebagai peran seorang budak yang mengantarkan anak majikannya untuk belajar. Menurut Jumali dkk. (2004), hakikat pendidikan melibatkan interaksi antara guru, murid, kurikulum, evaluasi, dan administrasi yang secara bersamaan memproses didik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepribadian mereka dalam suatu kerangka kalender akademik.

Filsafat pendidikan di Indonesia ditanamkan pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus ditanamkan kepada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional di semua tingkatan dan jenis pendidikan. Menurut Jumali dkk. (2004), ada dua pandangan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis pendidikan Indonesia. Pertama, pandangan mengenai manusia Indonesia. Filsafat pendidikan nasional memandang manusia Indonesia sebagai:

- A. makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya;
- B. makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya;
- C. makhluk sosial yang memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam masyarakat pluralistik, baik dari segi sosial budaya, lingkungan hidup, maupun kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah masyarakat global yang selalu berkembang dengan berbagai tantangannya.

Kedua, pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam perspektif filosofis, pendidikan nasional dipandang sebagai pranata sosial yang berinteraksi dengan lembaga sosial lainnya dalam masyarakat. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan adalah proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, meliputi aspek intelektual dan emosional, yang berujung pada pembentukan karakter manusia. Filsafat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Brubachen menyatakan bahwa filsafat pendidikan ibarat menempatkan kereta di depan kuda, di mana filsafat dianggap sebagai bunga, bukan sebagai akar tunggal pendidikan. Filsafat pendidikan berdiri secara mandiri dan memperoleh keuntungan dari ringkasan dengan filsafat umum, meskipun hubungan tersebut tidak selalu krusial, yang menghasilkan keterpaduan antara pandangan filosofi dan filsafat pendidikan, karena filsafat sering diartikan sebagai teori pendidikan secara umum Pancasila merupakan pandangan hidup yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika sistem pendidikan nasional Indonesia dilandasi, dihayati, dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia perlu diwujudkan secara terstruktur melalui sistem pendidikan yang didasari oleh keyakinan, pandangan hidup, dan filosofi tertentu. Inilah alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila menjadi suatu kebutuhan nasional, dan sistem filsafat pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sistem negara yang berlandaskan Pancasila.

Dengan mempertimbangkan peran pendidikan dalam mengembangkan potensi bangsa, terutama dalam melestarikan budaya dan identitas bangsa yang pada titik menentukan eksistensi dan martabat bangsa, sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila seharusnya dikembangkan secara maksimal agar martabat dan identitas bangsa dapat terjaga. Filsafat pendidikan Pancasila menjadi aspek spiritual dari sistem pendidikan nasional; Tanpa adanya filsafat pendidikan, tidak akan ada sistem pendidikan nasional yang berarti.

FILSAFAT PANCASILA DALAM MEMBANGUN BANGSA BERKARAKTER

Demokrasi Pancasila menegaskan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia sebagai individu dalam masyarakat, negara, dan bangsa (Arbi, 1998). Orientasi hidup kita fokus pada nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik kemanusiaan yang tampak dalam Pancasila mencakup sifat integral, etis, dan religius (Poeposwardoyo, 1989). Filsafat pendidikan Pancasila mencerminkan ciri-ciri tersebut, sebagai berikut:

- A. Integral : Kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila bersifat integral, yaitu pengakuan terhadap manusia secara utuh. Manusia dipandang sebagai kesatuan antara jiwa dan tubuh, serta sebagai individu yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Aspek kedua ini sesungguhnya adalah dua sisi dari satu realitas mengenai manusia. Hakikat manusia seperti ini adalah hakikat subjek didikan.
- B. Etis : Pancasila memiliki dimensi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas setiap individu, yang berarti menempatkan kebebasan pada posisi yang tinggi, namun tidak secara mutlak seperti dalam liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang disertai tanggung jawab.
- C. Religius : Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa aspek keagamaan merupakan bagian yang melekat pada hakikat manusia, sehingga pandangan kemanusiaan dalam Pancasila adalah pandangan yang religius. Sifat religius ini mencerminkan kecenderungan dasar dan potensi manusia. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta dan sumber eksistensi, serta menghargai nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Kebebasan beragama adalah hak asasi yang paling mendasar di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama berasal langsung dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak atas kebebasan beragama bukanlah diberikan dari negara, individu, atau kelompok mana pun. Agama dan keyakinan kepada Tuhan adalah hal yang sangat fundamental.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil penerapan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai falsafah dan pedoman perilaku bagi bangsa Indonesia, yang sejalan dengan budaya dan adat ketimuran kita. Pendidikan karakter hendaknya bersumber dari nilai-nilai Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup mandiri dan bersosialisasi, serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, sekaligus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesemuanya mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang memiliki ciri-ciri integral, etis, dan religius.

Oleh karena itu, para pendidik perlu menyadari pentingnya karakter pendidikan. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pendidik dalam menerapkan nilai-nilai tersebut:

- A. Memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik.
- B. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- C. Memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada siswa.

Dengan dilaksanakannya tiga poin tersebut, diharapkan cita-cita bangsa untuk mewujudkan pendidikan berkarakter sesuai dengan falsafah Pancasila dapat terwujud. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berlanjut, menghambat kemajuan ini adalah hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menerapkan pendidikan berkarakter adalah dengan mengikuti poin-poin di atas.

KESIMPULAN

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan bekerja sama antar sila-silanya dengan tujuan tertentu. Secara keseluruhan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan memiliki berbagai esensi, nilai, dan prinsip dasar. Kesatuan sila-sila Pancasila tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang hukum rasional, tetapi juga dari perspektif kesatuan asas ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Meskipun setiap sila mempunyai asas dan tugas masing-masing, secara keseluruhan Pancasila membentuk satu kesatuan yang terstruktur. Sebagai sistem filsafat, Pancasila berfungsi sebagai konteks yang mampu mempersatukan serta sebagai cita-cita bersama, serta sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik.

Pancasila juga dapat dipandang sebagai sebuah filsafat karena berfungsi sebagai acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa. Melalui upaya keilmuan, Pancasila dapat dibangun menjadi sistem filsafat yang kredibel. Pendidikan suatu bangsa secara otomatis akan terpengaruh oleh ideologi yang dianutnya. Pancasila berperan sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia, memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Filsafat sendiri merupakan proses berpikir yang mendalam dan serius untuk mencari kebenaran, sedangkan filsafat pendidikan adalah pemikiran mendalam tentang pendidikan berdasarkan pada filosofi tertentu. Ketika kita mengangkat fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan dari perspektif filsafat pendidikan, Pancasila menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasarkan, dan mencerminkan identitas Pancasila.

Penting untuk menyelenggarakan pendidikan moral, pengembangan wawasan, keterampilan, dan penanaman rasa nasionalisme pada generasi muda, karena merekalah yang akan menjadi tulang punggung negara di masa depan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menanamkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila.

Saran

Penulis berharap bahwa materi yang terdapat dalam makalah ini, yang mencakup Pancasila sebagai sistem filsafat, dapat memperluas wawasan dan memberikan daftar bacaan yang bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca. Meskipun penulis berusaha mencapai kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, nyatanya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, penulis dapat terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hairul Amren selaku Dosen Mata Kuliah Umum Pancasila yang senantiasa memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Syamsudin, M., & Dkk. (2009). PENDIDIKAN PANCASILA. Taufiqurrahman. (2018). Pendidikan Pancasila.
- Safitri, R. (1981). Konsep Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699
- Izza, H., Fadhila, N., Najicha, F. U., & Maret, U. S. (2021). PENTINGNYA MEMAHAMI DAN MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI- NILAI PANCASILA DI LINGKUNGAN MASYARAKAT. 4(2).
- Kaelan. (1996). Kesatuan Sila-sila Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 1(1), 42–52.

- <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31640>
- Nuruzzaman, M. (2018). PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM PENERAPAN KONSEP NEGARA HUKUM INDONESIA. TERORISME DAN MEDIA SOSIAL SISI GELAP BERKEMBANGNYA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI Mohammad, 3(8), 27–38.
- Semadi, Y. P. (2019). Filsafat Pancasila Dalam Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2(2), 82–89.
- Wicaksono, R. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Reformasi Dalam Mencegah Berkembangnya Tindak Radikalisme. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 1(2). <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/22>
- Kaelan. 2005. Filsafat Pancasila sebagai Filasfat Bangsa Negara Indonesia. Makalah pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta. Noor Syam, Moh. 1986. Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Kependidikan Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kaelan, 2013, Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.